

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku:

- Ali. Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Ali. Zainudin. 2010. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bawengan. Gerson W.. 1997. *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Dirdjosisworo. Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum..PT*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Djisman Samosir. 2002. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. CV. Putra Abardin. Bandung.
- Djoko Prakoso, 2010. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta.
- Dwidja Priyanto, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.
- Hamzah. Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan (Dari Retribusi ke Reformasi)*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Irwan Pandjaitan. Petrus. dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Lamintang. P.A.F.. 2000. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung:
- Nurulaen. Yuyun. 2012. *Lembaga Pemasarakatan Masalah dan Solusi*. Marja. Bandung.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 2005. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacanamedia. Jakarta.
- Rocky Marbun dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Visi Media. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Surya Eka P Nentu. 2015. *Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan*. UIN Hasanuddin. Banten

## **II. Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

## **III. Lain-lain:**

MENKUMHAM. 2015. "Permen Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." Permen Nomor 65 (879): 2004–6.

Narindrani, Fuzi. 2017. "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 (1): 111. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129>.

Pratama, Aldo. 2020. "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420–33.

Republik Indonesia. 1995. "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120 (11): 259. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).

Republik Indonesia. 2013. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 356: 10.

Suharyanti, Noni. 2015. "Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4 (1): 112–25. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p09>.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Wirmyati, Ni Luh Novi, and I Nyoman Gede Remaja. 2019. "Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja." *Kertha Widya* 6 (2): 17– 32. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.301>